TA'LIMUNA
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
P-ISSN 2085-2975 E-ISSN 2622-9889

NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: KAJIAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG PRINSIP DAN TUJUAN KENEGARAAN

The State from an Islamic Perspective: A Study of Qur'anic Verses on The Principles and Objectives of State Governance

Rudi Iskandar
Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta Timur, Indonesia
rudiiskandar643@gmail.com

Keywords
Etika Politik
Negara Islam
Prinsip Pemerintahan
Tafsir Al-Qur'an
Tujuan Negara

Abstract

In the context of modern state governance, Islamic political values provide an ethical framework to strengthen the integrity of government and public policy. This study explores the principles and objectives of the state in the Qur'an and Hadith, supported by interpretations of classical and contemporary scholars. The aim is to identify the principles of governance and the objectives of the state from an Islamic perspective and to examine their relevance to modern administration. The method used is library research with primary sources from Al-Qur'an, Hadith, and Qur'anic interpretation, along with secondary sources from academic literature. The analysis applies a thematic exegesis approach and qualitative interpretation. The findings show that the principles of Islamic governance include trust (Surah al-Nisa' [4]: 58), justice (al-Ma'idah [5]: 8), consultation (al-Shura [42]: 38), unity (Ali 'Imran [3]: 103), and freedom of religion (al-Baqarah [2]: 256). The objectives of the state cover public welfare, the establishment of justice, and the development of a moral society. The implication of this study is that it reinforces previous findings on justice and consultation while adding a new perspective by highlighting the integration of human values and universal welfare in modern governance. The limitation lies in its normative-theological approach, which does not address empirical dimensions, so further research is needed to test the application of these principles in contemporary state governance.

Di tengah tata kelola negara modern, nilai-nilai politik Islam memberikan kerangka etis untuk memperkuat integritas pemerintahan dan kebijakan

publik. Kajian ini mengeksplorasi prinsip dan tujuan kenegaraan dalam Al-Qur'an dan Hadis, didukung penafsiran ulama klasik dan kontemporer. Tujuannya mengidentifikasi prinsip pemerintahan dan tujuan negara dalam perspektif Islam serta relevansinya dengan administrasi modern. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan tafsir, serta sumber sekunder dari literatur akademik. Analisis dilakukan melalui pendekatan tafsir tematik dan interpretasi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pemerintahan Islam mencakup amanah (Surat al-Nisa' [4]: 58), keadilan (al-Ma'idah [5]: 8), musyawarah (al-Syura [42]: 38), persatuan (Ali 'Imran [3]: 103), dan kebebasan beragama (al-Baqarah [2]: 256). Tujuan negara meliputi kesejahteraan publik, tegaknya keadilan, dan terbentuknya masyarakat bermoral. Implikasi penelitian ini adalah memperkuat temuan terdahulu tentang keadilan dan musyawarah, serta menambah perspektif baru yang menekankan integrasi nilai kemanusiaan dan visi kemaslahatan universal. Limitasinya adalah pendekatan normatif-teologis yang belum menyentuh dimensi empiris, sehingga penelitian lanjutan perlu menguji penerapan prinsip-prinsip ini dalam tata kelola negara modern.

Received	Revised	Accepted	Available Online
1 Agustus 2025	22 September 2024	31 Agustus 2025	30 September 2025

A. PENDAHULUAN

Konsep negara dan pemerintahan merupakan pilar penting dalam membangun peradaban manusia. Sejak zaman kuno, manusia berupaya merumuskan bentuk organisasi sosial-politik yang mampu mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Dalam pemikiran modern, negara dipahami sebagai entitas politik berdaulat yang diatur konstitusi, sedangkan pemerintahan adalah mekanisme pengelolaan kekuasaan demi tercapainya tujuan negara. Islam menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai fondasi utama, dengan Al-Qur'an sebagai sumber dan pedoman tata kelola negara.

Perkembangan zaman yang ditandai globalisasi, sekularisasi, dan modernisasi membawa tantangan bagi umat Islam dalam memaknai kembali konsep negara dan pemerintahan. Fenomena kemerosotan moral, krisis kepemimpinan, dan ketidakadilan sosial menuntut refleksi mendalam terhadap sistem politik ideal. Al-Qur'an tidak hanya memberikan prinsip etis dan moral, tetapi juga kerangka normatif bagi penyelenggaraan negara yang berpihak pada keadilan, kesejahteraan rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kajian makna dan tujuan negara menurut Al-Qur'an relevan untuk menjawab problematika kontemporer.

Sejarah peradaban Islam menawarkan model konkret penerapan prinsip tersebut, seperti Negara Madinah di bawah Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Periode ini menunjukkan sinergi norma ilahiah dan realitas sosial-politik yang melahirkan pemerintahan berasaskan musyawarah (*syura*), keadilan, dan tanggung jawab sosial. Mengkaji kembali bentuk negara dan pemerintahan Islam dari perspektif Al-Qur'an dan sejarah tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga memberikan inspirasi praktis untuk merumuskan pemerintahan yang selaras tuntutan zaman tanpa mengabaikan prinsip dasar Islam.

Negara pada hakikatnya adalah entitas abstrak yang tercermin dalam sistem kenegaraan, berbeda dari lembaga negara yang hanya instrumen mencapai tujuan negara (Purba & Sovie, 2024). Dalam Al-Qur'an, istilah *al-balad* lebih sering merujuk pada wilayah atau teritori tertentu, seperti Makkah yang disebut *al-balad*. Salah satu prinsip penyelenggaraan negara dalam Al-Qur'an adalah doa Nabi Ibrahim AS tentang negara yang aman, menggunakan istilah *al-balad al-amin* dan *baladan aminan*. Kedua istilah ini mengandung makna perlindungan bagi warga melalui pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, dan spiritual (Azkiah et al., 2024).

Konsep negara dalam Al-Qur'an terkait erat dengan batas wilayah dan keberadaan penduduk, tercermin dalam istilah *al-balad*, *al-bilad*, dan *baldah* yang secara umum merujuk pada suatu tempat. Dalam Islam, kekuasaan pemerintah bukan mutlak, melainkan harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang wajib dipegang penyelenggara pemerintahan (W. Kurniawan et al., 2023). Makna negara dapat ditelusuri melalui konsep kunci seperti *ummah* (komunitas dengan nilai dan tujuan bersama), *imamah* (kepemimpinan), dan *hukm* (pemerintahan/hukum). Al-Qur'an memposisikan negara bukan sekadar entitas politik berdaulat, tetapi amanah menjaga keteraturan sosial, melindungi hak dasar, dan menegakkan hukum Allah, sehingga terkait tanggung jawab moral dan spiritual. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa negara Islam dibangun atas fondasi akidah dan pemikiran (Abdullah, 2017).

Tujuan negara dalam kerangka Qur'ani berakar pada prinsip universal yang tercermin dalam ayat-ayat tentang penegakan keadilan (*al-'adl*), pemeliharaan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dan perlindungan kebebasan beragama. Negara diharapkan menjadi sarana mewujudkan masyarakat aman, damai, dan sejahtera dengan tatanan hukum adil tanpa diskriminasi. Nilai-nilai ini bersifat transhistoris dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial-politik sepanjang berpijak pada wahyu. Al-Qaradhawi merumuskan empat tujuan pemerintahan Islam: melindungi rakyat tanpa menguasai lahir dan batin, menunaikan amanat kepada yang berhak, menegakkan keadilan bagi seluruh umat, dan mengokohkan agama melalui penanaman akidah serta penerapan hukum (Abdullah, 2017). Senada, al-Maududi menegaskan tujuan negara Islam meliputi pencegahan eksploitasi antar-individu, menjaga kebebasan ekonomi, politik, pendidikan, dan agama, menegakkan keadilan sosial, memberantas kemungkaran, serta mewujudkan negara aman dan adil melalui hukum tanpa diskriminasi (Damanik, 2019).

Pemerintahan Islam dipandang sebagai amanah Ilahi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kekuasaan politik. Sistem ini komprehensif dan fleksibel, menekankan keadilan, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap kritik. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tujuan akhir pemerintahan Islam adalah kemaslahatan dunia dan akhirat (Bakry et al., 2021). Al-Qur'an memberikan isyarat bentuk pemerintahan ideal melalui mekanisme *syura* (musyawarah), kepemimpinan amanah, dan penerapan hukum syariat. Prinsip ini terealisasi dalam sejarah, terutama pada masa Nabi Muhammad SAW dengan Piagam Madinah dan Khulafaur Rasyidin yang menerapkan kepemimpinan partisipatif dan responsif. Jadi, Al-Qur'an dan sejarah Islam menjadi sumber utama memahami pemerintahan Islam secara utuh.

Kajian literatur yang mengulas konsep negara dari perspektif Al-Qur'an dan historis membangun kerangka teoretis yang memadukan tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan kajian sejarah politik Islam. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi prinsip normatif sekaligus praktik pemerintahan. Landasan ini digunakan untuk menganalisis makna, tujuan, dan bentuk negara Islam secara terpadu.

Kajian tentang negara dan pemerintahan Islam telah dilakukan melalui pendekatan normatif Al-Qur'an maupun analisis sejarah politik Islam. Beberapa kajian menyoroti tafsir ayat tentang kepemimpinan, hukum, dan keadilan, sementara yang lain menelaah penerapan konsep seperti Negara Madinah. Namun, sebagian besar kajian fokus pada salah satu aspek –normatif atau historis– tanpa integrasi metodologis keduanya. Di tengah krisis tata kelola pemerintahan, gejolak sosial-politik, dan maraknya sistem yang menjauh dari nilai ketuhanan, kajian komprehensif yang menggabungkan analisis tematik Al-Qur'an dengan rekonstruksi historis menjadi sangat mendesak.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menyajikan sintesis yang tidak hanya memaparkan makna dan tujuan negara dalam Al-Qur'an, tetapi juga menautkannya dengan model nyata dalam sejarah Islam. Hasilnya adalah konsep pemerintahan aplikatif untuk konteks kontemporer sekaligus menjawab kekosongan literatur akademik signifikan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menelusuri pandangan Al-Qur'an tentang konsep negara, mencakup makna, tujuan, dan bentuk pemerintahan Islam, merujuk pada ayat-ayat dan catatan sejarah.

Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan keterkaitan erat antara konsep negara, politik, dan nilai Islam dalam berbagai perspektif. Pemikiran al-Maududi sebagai tokoh politik Islam yang mengaitkan agama, budaya, sosial, dan politik dibahas komprehensif (Anggreini et al., 2022), dimensi sosio-politik dalam tafsir *Tafhim al-Qur'an* Maududi, termasuk konsep jihad dan negara Islam, dianalisis kritis (Rochmawati, 2022), kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an melalui tafsir tematik dengan sorotan bias patriarki dan prinsip egalitarianisme Islam dikaji mendalam (Lutfiyah & Diyanah, 2022), relevansi ayat politik Al-Qur'an terhadap prinsip *good governance* seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan kepemimpinan berbasis kompetensi dibahas kontekstual (Alhabsyi, 2025), terminologi *ulil amri* sebagai

dasar kepemimpinan ideal menurut Al-Qur'an diulas dengan analisis makna (Jamal & Kadarusman, 2014), dan Hubungan agama–negara di Indonesia dan perdebatan negara sekuler versus negara agama dikaji dengan pendekatan teologi Calvinis yang menyimpulkan Indonesia sebagai negara Pancasila berketuhanan (Mofun, 2023).

Meskipun kajian tersebut penting, belum ada penelitian yang secara khusus menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengidentifikasi konsep negara Islam secara komprehensif sekaligus menguraikan tujuan utamanya menurut Islam. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan analisis terintegrasi berbasis tafsir tematik yang memadukan dimensi normatif-teologis dan visi politik Islam, menghasilkan kerangka konseptual lebih menyeluruh dibanding studi sebelumnya yang parsial atau berbasis figur.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, dengan seluruh data bersumber dari literatur otoritatif. Penelitian kualitatif itu mengeksplorasi struktur, pola, dan makna yang mendasari pertanyaan penelitian (Saefudin et al., 2023). Fokus kajian diarahkan pada konsep dan tujuan negara dalam Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta penafsiran ulama klasik dan kontemporer. Metode utama adalah tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*), yakni metode penafsiran al-Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat bertema sama untuk dianalisis secara menyeluruh sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif (Alhakimi & Imawan, 2023).

Tahapan penelitian meliputi penentuan tema, pengumpulan ayat yang relevan, pengurutan sesuai konteks turunnya, telaah tafsir klasik dan kontemporer, serta penyusunan pemahaman integral dengan memperhatikan korelasi antar-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola makna dan relevansi prinsip kenegaraan. Validitas melalui triangulasi teori, yaitu membandingkan berbagai penafsiran dan memastikan hanya sumber terpercaya yang digunakan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai kaidah metodologi tafsir tematik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran ayat Al-Qur'an, ditemukan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar kenegaraan dalam Islam, khususnya dalam Surat al-Nisa' [4]: 58-59 dan al-Ma'idah [5]: 8.

Menurut al-Zamakhsyari, Surat al-Nisa' [4]: 58 menegaskan amanah sebagai fondasi etika kepemimpinan, mencakup tanggung jawab individual maupun institusional, termasuk harta, jabatan, dan kekuasaan. Amanah harus diserahkan kepada pihak yang berhak dan berkompeten, serta menjadi dasar bagi keadilan hukum melalui objektivitas pemimpin dalam mengambil keputusan. Sedangkan Surat al-Nisa' [4]: 59 menekankan ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasulullah SAW, sedangkan ketaatan kepada ulil amri bersyarat pada kepatuhan mereka terhadap hukum Allah dan Rasulullah SAW. Istilah *ulil amri*

dipahami luas, mencakup pemimpin politik, hakim, militer, maupun ulama yang menegakkan hukum Allah SWT (Lubis, 2025).

Tafsir at-Thabari menambahkan, makna *ulil amri* merujuk kepada *ahlul 'ilmi wal fiqh* (ahli ilmu dan fikih). Sebagian ulama menafsirkannya sebagai sahabat Rasulullah SAW, sementara pendapat lain menyebutkan Abu Bakar dan Umar RA (Nurseta & Riyadi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa konsep *ulil amri* tidak terbatas pada otoritas politik, tetapi juga otoritas keilmuan dan moral.

Sementara itu, Surat al-Ma'idah [5]: 8 menegaskan kewajiban berlaku adil, bahkan kepada pihak yang dibenci. Menurut tafsir Quraish Shihab dan Ibnu Katsir, keadilan dalam ayat ini harus dilaksanakan lahir-batin, berlandaskan niat karena Allah SWT, serta tanpa diskriminasi meskipun merugikan diri, orang tua, atau kerabat. Ayat ini menekankan bahwa keadilan harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, karena keadilan lebih dekat kepada takwa (Idris et al., 2025). Dengan demikian, temuan utama penelitian ini adalah bahwa amanah dan keadilan merupakan dua prinsip utama kenegaraan dalam Islam yang menjadi landasan bagi legitimasi kekuasaan dan tata kelola pemerintahan.

1. Prinsip Kenegaraan

Berdasarkan temuan, terdapat sejumlah prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan negara menurut Al-Qur'an. Prinsip keadilan ditegaskan dalam Surat al-Nisa' [4]: 58–59 (Sidqy & Taqwa, 2024; Zahra et al., 2022) dan al-Ma'idah [5]: 8 (Agustin et al., 2025; I. Kurniawan & Nasrulloh, 2025), yang menekankan amanah, objektivitas hukum, serta keadilan universal. Serta Surat al-Nahl [16]: 90 yang menegaskan adil sebagai asas akhlak baik. Ibn 'Asyur menempatkan adil bersama *ihsan* sebagai nilai pokok, dengan berbuat baik kepada kerabat sebagai manifestasinya (Anior et al., 2024).

Prinsip musyawarah dalam Surat al-Syura [42]: 38 menekankan pengambilan keputusan kolektif (Muttaqin & Apriadi, 2020). Prinsip persatuan dan persaudaraan tercermin dalam Surat al-Hujurat [49]: 10–13 yang menegaskan umat beriman sebagai satu kesatuan yang harus menghindari perpecahan (Faisal, 2022; Shohib et al., 2024). Prinsip kebebasan beragama ditegaskan dalam Surat al-Baqarah [2]: 256, bahwa tidak ada paksaan dalam memilih keyakinan (Ansari & Alzamzami, 2022; Armayanto et al., 2023).

Secara konseptual, nilai-nilai ini sejalan dengan *Fiqih Siyasah* (Fikih Politik) yang menekankan amanah, musyawarah, dan keadilan sebagai fondasi politik Islam (Amalih & Al-Haq, 2021). Perbedaannya, penelitian ini memberi penekanan pada integrasi prinsip-prinsip Qur'ani dengan praktik kenegaraan modern sehingga relevan bagi tata kelola negara kontemporer.

2. Tujuan Kenegaraan

Tujuan negara dalam Islam bertumpu pada kemaslahatan, keadilan, dan pembinaan moral masyarakat. Misalnya, Surat al-Hajj [22]: 41 menekankan kewajiban pemimpin menegakkan salat, zakat,

serta amar ma'ruf nahi munkar. Surat al-Mumtahanah [60]: 8 dan al-Nahl [16]: 90 mendorong berbuat baik, berlaku adil, dan mencegah kemungkaran. Surat al-Baqarah [2]: 179 menjelaskan *qishash* untuk menjaga kehidupan, dan Surat al-Anbiya [21]: 107 mengarahkan negara agar menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmat lil 'alamin*).

Hadis-hadis Nabi memperkuat hal ini, seperti Hadis riwayat Muslim tentang pemimpin sebagai pengurus rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban; Hadis riwayat Ahmad mengenai hubungan saling mencintai pemimpin dan rakyat; Hadis riwayat Bukhari yang mengibaratkan pemimpin sebagai gembala; serta Hadis riwayat al-Tirmidzi yang menjanjikan naungan Allah SWT bagi pemimpin yang adil. Dengan demikian, tujuan negara dalam Islam mencakup penegakan ibadah, keadilan, perlindungan hak, serta penciptaan kemaslahatan berdasarkan nilai ilahiah (Ansori et al., 2025).

Sejalan dengan *Fiqih Siyasah*, konsep negara dipandang sebagai sarana menegakkan hukum Allah SWT dan menjaga tatanan sosial, tetapi penelitian ini memberi kontribusi dengan menegaskan relevansi prinsip Qur'ani sebagai dasar etis dalam membangun negara modern yang adil dan inklusif.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kenegaraan dalam perspektif Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis dengan pilar utama berupa amanah, keadilan, musyawarah, persatuan, dan kebebasan beragama. Kajian terhadap Surat al-Nisa' [4]: 58–59, al-Ma'idah [5]: 8, al-Hujurat [49]: 10–13, al-Baqarah [2]: 256, dan al-Nur [24]: 55 menegaskan bahwa penyelenggaraan negara ideal dalam Islam harus mengintegrasikan prinsip syariat, etika kepemimpinan, dan visi kemaslahatan universal.

Implikasi kajian ini tidak hanya memperkuat penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya keadilan dan musyawarah sebagai fondasi negara Islam, tetapi juga menambah perspektif baru dengan menekankan integrasi nilai kemanusiaan dan visi kemaslahatan universal dalam tata kelola negara modern. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi teoretis bagi kajian politik Islam, khususnya dalam memahami hubungan agama dan negara.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus yang masih bersifat normatif-teologis sehingga belum membahas penerapan prinsip-prinsip tersebut pada konteks negara modern secara komparatif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi lapangan atau kajian perbandingan antarnegara Muslim guna menguji efektivitas penerapan prinsip-prinsip kenegaraan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dalam tata kelola pemerintahan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. R. (2017). Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi. *Asy-Syari'ah*, *19*(1), 15–36. https://doi.org/10.15575/as.v19i1.4134

Agustin, N. A. M., Farid, M., Syawal, A., Wibisono, M. I., & Kamaludin, M. A. (2025). Karakteristik Spiritual Leadership dalam Tafsir Qs. Al-Maidah Ayat 8. *JURRAFI: Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, *4*(1), 28–37. https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4346

Alhabsyi, M. H. (2025). Relevansi Ayat-Ayat Politik Al-Qur'an dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern: Kajian Kualitatif Tafsir Tematik: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *3*(4), 5620–5625. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1467

Alhakimi, I. M., & Imawan, D. H. (2023). The Meaning of the Word Patience in the Study of Tafsir Maudhu'i. *Nizham Journal of Islamic Studies*, *11*(02), 240–251. https://doi.org/10.32332/nizham.v11i02.7554

Amalih, I., & Al-Haq, H. (2021). Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an (Tela'ah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhār). *El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, *5*(2). https://doi.org/10.28944/el-waroqoh.v5i2.315

Anggreini, Z. S., Sari, S. N. I., & Zidny, A. Z. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Abu A'la Al-Maududi. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *6*(01), 37. https://doi.org/10.30868/ad.v6i01.1951

Anior, I. A., Kholillah, N., & Rahmawati, A. (2024). Konsep Kejujuran dan Keadilan dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik). *Al-Qadim: Jurnal Tafisr dan Ilmu Tafsir*, *1*(2), 45–55.

Ansari, I., & Alzamzami, M. (2022). Moderasi Agama Perspektif Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar Qs. al-Baqarah: 256. *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, *1*(2), 106–130. https://doi.org/10.30631/jrm.v1i2.11

Ansori, Riyadi, S., Firdaus, A. S., & Anwar, K. (2025). Dasar Al-Qur'an Dan Hadits Tentang Kepemimpinan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, *2*(2), 2526–2540.

Armayanto, H., Dzulhadi, Q. N., & Ulfa, M. (2023). Between Freedom of Religion and Apostasy in Islam: Analysis of Surah Al-Baqarah Verse 256: Antara Kebebasan Beragama dan Murtad dalam Islam: Analisis terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 256. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, *1*(1), 113–135. https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.9

Azkiah, N., Aziz, M. A., & Muhyi, A. A. (2024). Lembaga Negara dan Pergulatan Sejarah (Analisis Tafsir Maudhu'i. *An Najah: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan*, *3*(4), 170–179.

Bakry, K., Abbas, A. H., Ashar, & Hamid, A. N. (2021). Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah). *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, *7*(1), 1–19. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.201

Damanik, A. (2019). Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi. *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, *5*(1), 95–110. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v5i1.1720

Faisal, M. (2022). Penguatan Nilai Nilai Pendidikan Karakter Melalui Kisah-Kisah Alquran Perspektif Tafsir Tarbawi. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, *18*(1), 34–45. https://doi.org/10.54069/attaqwa.v18i1.212

Idris, M., Wiwana, A. R., & Sholihah. (2025). Analisis Ayat-Ayat Keadilan dalam Tafsir Ayat Politik. *EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(2), 607–619. https://doi.org/10.56832/edu.v5i2.1300

Jamal, K. & Kadarusman. (2014). Terminologi Pemimpin dalam Alqur'an (Studi Analisis Makna Ulil

Amri dalam Kajian Tafsir Tematik). *AN-NIDA*, *39*(1), 118–128. http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v39i1.869

Kurniawan, I. & Nasrulloh. (2025). Karakter Pemimpin Ideal Menurut Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Hidayatul Qur'an). *Esensi Pendidikan Inspiratif*, *7*(2), 733–748.

Kurniawan, W., Suminar, S., Thiebaty, S. Z., Solahudin, N. A., & Muhyi, A. A. (2023). Lembaga Negara Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i). *Jurnal Al-Qalam Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, *15*(1), 122–132. https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i1.2102

Lubis, M. H. A. (2025). Konsep Kepemimpinan dalam Surah An-Nisa Ayat 58-59 Pada Tafsir Al Kasysyaf Karya Al-Zamakhsyari. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, *3*(1), 177–186. https://doi.org/10.61930/jsii.v3i1.1144

Lutfiyah, L., & Diyanah, L. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, *5*(2), 270–287. https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1399

Mofun, C. P. Y. (2023). Negara Sekuler atau Negara Agama: Tinjauan Hubungan Agama-Negara dari Perspektif Teologi Calvinis. *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika*, *6*(2), 315–332. https://doi.org/10.34081/fidei.v6i2.335

Muttaqin, J., & Apriadi, A. (2020). Syura Atau Musyawarah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, *1*(2), 57–73. https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18

Nurseta, R., & Riyadi, M. I. (2022). Tafsir Ayat Politik Perspektif Nadirsyah Hosen. *Proceeding of The 2nd Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era*, *2*(1), 121–134.

Purba, I., & Sovie, F. (2024). Lembaga Negara Menurut Islam. *ASAS Law Journal*, *2*(2), 1–10.

Rochmawati, N. A. (2022). Dimensi Sosio Politik Abu A'la Al-Maududi dalam Tafhimal-Qur'an. *Al Munir: Jurnal Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, *4*(1), 55–73. https://doi.org/10.24239/al-munir.v4i01.123

Saefudin, D. P., Mulyadi, M., & Santosa, P. P. P. (2023). The Analysis of Flouting Maxim in the @Pepekomik comic strip. *SALEE: Study of Applied Linguistics and English Education*, *4*(2), 367–379. https://doi.org/10.35961/salee.v4i2.764

Shohib, M., Al Masithoh, S., & Al-Ghifari, F. H. (2024). Ukhuwah Islamiyah dan Interaksi Harmonis Antarumat Beragama di Indonesia: Kajian Tafsir Ayat-Ayat Ukhuwah dalam Al-Qur'an. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, *7*(2), 493–512. https://doi.org/10.58518/alfurqon.v7i2.2934

Sidqy, M., & Taqwa, H. (2024). Tafsir Tahlili Q.S An-Nisa Ayat 58-63; Dasar-Dasar Pemerintahan. *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, *3*(2), 154–169. https://doi.org/10.56672/attadris.v3i2.465

Zahra, I. A., Marno, & Wibawa, B. (2022). Kewajiban Pemimpin dan Rakyat dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58-59. *Journal of Islamic Education Studies*, *1*(1), 10–16. https://doi.org/10.58569/jies.v1i1.431